KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU MD3: Penambahan kursi pimpinan tunggu lobi partai
Tanggal : Rabu, 05 April 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

::REVISI UU MD3

Penambahan Kursi Pimpinan Tunggu Lobi Partai

JAKARTA – Revisi terbatas terhadap Undang-Undang No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang pembahasannya telah diamanatkan ke Badan Legislasi (Baleg) hingga saat ini belum ada keputusan final. Poin penting dalam revisi terbatas, yakni mengenai penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR saat ini masih menunggu hasil akhir lobi antarpimpinan fraksi dan pimpinan partai politik.

"Kita masih menunggu hasil lobi pimpinan parpol, pimpinan fraksi, dan pimpinan DPR. Kalau hari ini selesai, ya besok bisa dijadwalkan," kata Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, saat sidang pembukaan paripurna Maret lalu, diputuskan revisi terbatas sesuai yang sudah diharmonisasi, yakni penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR untuk mengakomodasi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, dalam perkembangannya, ada sejumlah fraksi di DPR yang juga mengusulkan agar penambahan tidak hanya untuk satu kursi pimpinan agar dari segi komposisi tidak genap jumlahnya.

Dari dinamika yang berkembang itulah, kemudian diserahkan untuk lobi antarpimpinan fraksi dan pimpinan parpol serta pimpinan DPR. Sebagai tindak lanjut pembahasan, Baleg DPR yang sudah mengagendakan kemarin terpaksa menunda karena belum ada kesepakatan lobi dari pimpinan parpol, pimpinan fraksi, dan pimpinan DPR.

Firman menjanjikan, begitu hasil lobi sudah ada, maka pembahasannya bisa langsung dilakukan dan segera diselesaikan untuk diagendakan dalam rapat paripurna DPR.

FIRMAN SOEBAGYO

"Supaya pembahasan tidak melebar, maka mau dibahas lagi agar konsisten terhadap masalah yang terkait dengan revisi atau inisiatif dewan yang sudah disahkan saat paripurna," ujarnya.

Menurut Firman, walaupun kemungkinan berubah bisa saja terjadi atas apa yang telah disepakati dalam paripurna, tapi dia tetap mendorong konsistensi masing-masing fraksi agar pembahasan dan pengambilan keputusannya bisa lebih mudah. "Kalau konsisten dari awal akan memudahkan. Kita kan harus mengedepankan asas musyawarah," paparnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pembahasan revisi UU MD3 diputuskan revisi terbatas sesuai yang sudah diharmonisasi, yakni penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR untuk mengakomodasi Fraksi PDIP. Dalam rapat Badan Musyawarah, kata Fadli, untuk pembahasan telah ditugaskan kepada Baleg DPR. "Rapat Bamus memberikan penugasan kepada Baleg untuk menindaklanjuti," katanya.

rahmat sahid